

NU DAN NEOLIBERALISME: “LEBIH BAIK MENYALAKAN LILIN DARIPADA MENGUTUK KEGELAPAN”



Alfariany Milati Fatimah

Alumni Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia



Alfanny

*Alumni Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan
Wakil Sekjen DPP Sarikat Buruh Muslimin
Indonesia/Sarbumusi)*

Sebagai orang awam mendengar kata NU, yang segera diingat dan dibayangkan adalah, *pertama*, kita mengingat Gus Dur sebagai ikon NU kontemporer walaupun sudah banyak ikon NU lainnya, tapi belum tergantikan hingga kini. *Kedua*, kita membayangkan sebuah pesantren tradisional di pelosok desa dengan berbagai atributnya seperti santri berkain sarung, kitab kuning dan lain-lain. *Ketiga*, kita mengingat PKB, sebuah partai berbasis massa NU yang tercatat sebagai partai di era reformasi yang paling banyak mengalami konflik internal.

Ingatkah kita bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terlebih dahulu mendirikan Nahdlatut Tujjar, organisasi saudagar yang menghimpun para saudagar dan ulama. Gunanya, mendo-
brak ketimpangan ekonomi masyarakat

akibat sistem ekonomi liberal sejak 1870 yang diterapkan kolonialisme Belanda.

Dan juga, suatu kebetulan bila K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pesantren yang hanya berjarak 200 m sebelah barat dari Pabrik Gula Cukir pada tahun 1899, selang 29 tahun sejak kolonialisme Belanda menghapuskan Tanam Paksa dan menerapkan politik liberal di Hindia Belanda. Sejak itulah, pemodal swasta Eropa dari Belanda, Inggris dan lain-lain menyerbu masuk Hindia Belanda menanamkan investasinya di sektor perkebunan yang era *Cultuurstelsel* (1830-1870) dimonopoli oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sistem liberalisme itulah yang menyebabkan berdirinya Pabrik Gula Cukir dan pabrik-pabrik gula lain di seantero Jawa yang secara sistematis telah melakukan proses pemiskinan yang dahsyat ter-

hadap rakyat Indonesia. Sejak diterapkannya *Cultuurstelsel* alias Tanam Paksa sejak 1830, kolonial Belanda merampas tanah-tanah pertanian milik rakyat untuk ditanami komoditas perkebunan yang laku di pasaran Eropa. Kondisi tersebut makin bertambah parah ketika 1870 diterapkan sistem liberal di mana saat itu tidak hanya pemerintah Kolonial yang merampas tanah rakyat, tapi juga swasta asing –walaupun “perampasan” tanah rakyat tersebut disamakan dengan istilah “menyewa tanah maksimal 75 tahun” sesuai ketentuan UU Agraria (*Agrarische Wet*).

Indonesia pada masa itu adalah pengekspor gula nomor dua terbesar di dunia setelah Kuba. Perkebunan tebu pun marak menggantikan tanaman makanan rakyat seperti padi dan palawija. Pabrik-pabrik gula berdiri di mana-mana. Jaringan rel kereta api pertama dibangun untuk menghubungkan perkebunan tebu dan pabrik gula di selatan Jawa dengan Semarang, kota pelabuhan di pantai utara Jawa.¹ Petani Indonesia yang kehilangan sawah terpaksa bekerja di perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula milik pengusaha Swasta Eropa. Salah satu pabrik gula itu adalah Pabrik Gula Cukir.

Dengan mendirikan sebuah pesantren di dekat Pabrik Gula Cukir, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mencoba berdakwah kepada kaum buruh di lingkungan Pabrik Cukir agar mau meninggalkan

kehidupan maksiat mereka dan mencari solusi atas himpitan ekonomi yang menimpa mereka akibat sistem kapitalisme-liberalisme. Pesantren yang didirikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun tidak hanya mengajarkan agama semata-mata, namun mengajak para santrinya yang sebagian besar adalah buruh Pabrik Gula Cukir untuk bertani dan berwirausaha. Ia tidak hanya berfungsi sebagai kiai, tapi juga sebagai motivator dan manajer yang mendorong dan mengendalikan sejumlah usaha ekonomi di pesantren tersebut. Tiap pagi usai shalat dhuha dan mengajar kitab, Kiai Hasyim mengumpulkan sebagian santrinya untuk diberikan berbagai macam tugas, seperti merawat sawah, ternak ataupun bangunan pondok. Kiai Hasyim juga seorang pedagang yang sukses. Dia memiliki tanah sampai puluhan hektar. Kadang Kiai Hasyim juga pergi Surabaya untuk berdagang kuda, besi dan menjual hasil pertaniannya. Dari bertani dan berdagang itulah, Kiai Hasyim menghidupi keluarga dan pesantrennya.

Nahdlatut Tujjar

Semangat kewirausahaan K.H. Hasyim Asy'ari ternyata juga dimiliki oleh hampir semua kiai saat itu. K.H. Hasyim Asy'ari bersama K.H. Wahab Chasbullah dan sejumlah kiai, serta saudagar santri lainnya bahkan mendirikan Nahdlatut Tujjar pada tahun 1918, sebuah organisasi yang menghimpun kiai dan

¹ Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Grafiti-Pers, 2005)

saudagar muslim untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Alasan Kiai Hasyim mendirikan Nahdlatut Tujjar ini antara lain, keprihatinan atas, problem-problem keumatan yang terkait erat dengan soal ekonomi. Apabila basis-basis dan simpul-simpul kemandirian ekonomi tidak dibangun, menurut Kiai Hasyim selain para ulama telah berdosa, bangsa ini juga akan terus terpuruk dalam kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan akibat dari kuatnya pengaruh Kolonial.

Sejak awal pendiriannya, Nahdlatut Tujjar telah mengenal dan menerapkan manajemen organisasi modern. Pembagian struktur organisasi dan pembagian kerja, di mana ada para pendiri, kepala perusahaan, direktur, sekretaris, marketing, dan pengawas keliling dipraktikkan di Nahdlatut Tujjar. K.H. Hasyim Asy'ari dipilih sebagai kepala perusahaan dan mufti (semacam komisaris), K.H. Wahab Chasbullah sebagai direktur perusahaan, H. Bisri sebagai sekretaris perusahaan, dan Syafi'i sebagai marketing sekaligus pengendali perusahaan.²

Namun, tampaknya Nahdlatut Tujjar tidak mampu bertahan lama dan meluaskan sayap organisasinya. Kelahiran NU pada 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari

dan sejumlah ulama lainnya merupakan salah satu penyebab Nahdlatut Tujjar stagnan. Namun, Kiai Hasyim dan para pendiri NU lainnya tetap meneruskan semangat gerakan ekonomi ala Nahdlatut Tujjar ke dalam NU. Dalam "Statuten NU tahun 1926" artikel 3 butir f disebutkan bahwa:

"ontoeik mentjapai maksoed perkoempoelan (NU) ini maka diadatkan ichtiar f. mendirikan badan2 oentoeik memadjoekan peroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam".³

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa NU membutuhkan pendirian badan-badan usaha yang dapat digunakan untuk menopang kebutuhan finansial NU sebagaimana Nahdlatut Tujjar menopang keberadaan pesantren-pesantren tradisional saat itu.⁴ Dari pengamatan sekilas tentang keberadaan pesantren-pesantren tradisional di seantero Nusantara, pola semacam ini kerap kita temui, di mana kiai pengasuh pondok menghidupi pesantrennya dengan wirausaha pertanian dan perniagaan. Berbeda dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah Kolonial karena mau menerapkan me-

² Adien Jauharuddin, *Menggerakkan Nahdlatut Tujjar*, (Jakarta: PMPI, 2008)

³ Kutipan Statuten NU dalam AD/ART Nahdlatul Ulama, Sekretariat Jenderal PBNU

⁴ Jarkom Fatwa Surabaya, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*, (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2004). Dalam buku ini diuraikan bagaimana tim peneliti Jarkom menemukan fakta bahwa para pedagang di Banyuwangi di bawah koordinasi Nahdlatut Tujjar berdagang di Pasar di mana sebagian hasilnya digunakan untuk menyumbang pesantren di sekitarnya, salah satunya Pesantren Ngronggot.

tode pendidikan ala Belanda, maka pesantren-pesantren tradisional NU harus menghidupi dirinya sendiri (*self financing*) karena berada di luar sistem pendidikan Kolonial sebagaimana ketentuan *Wilde Scholen Ordonantie* dan *Onderwijs Ordonantie*.⁵

NU Masuk Politik, Sosial-Ekonomi Terabaikan?

Setelah era kolonialisme Belanda berakhir, NU –dan seluruh bangsa- memasuki masa yang sulit di bawah pendudukan pemerintahan militer Jepang. Sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia dieksploitasi habis-habisan oleh Jepang untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II. Kehidupan sosial-ekonomi rakyat benar-benar mencapai titik nadir karena Jepang menerapkan berbagai kewajiban seperti setor padi, menanam jarak, romusha dan lain-lain yang bersifat eksploitasi ekonomi.

Pasca proklamasi hingga era Demokrasi Terpimpin, NU pun tidak

sempat membenahi sayap ekonominya, karena sumber daya yang NU miliki dikerahkan untuk mobilisasi politik terutama pada Pemilu 1955 dan mempertahankan eksistensi NU dari ancaman PKI di akhir era Demokrasi Terpimpin.

Uniknya, di era mobilisasi politik yang amat intensif tersebut, NU sempat membentuk badan otonom yang terkait dengan aktifitas ekonomi yaitu Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslimin Indonesia), Sernemi (Serikat Nelayan Muslimin Indonesia) dan Pertanu (Pergerakan Tani NU). Walaupun ketiga banom tersebut didirikan untuk memobilisasi massa buruh, tani dan nelayan Nahdliyin dalam menghadapi tantangan PKI yang kokoh dengan BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), namun sedikit banyak ketiga banom tersebut –terutama Sarbumusi- mempunyai dampak sosial-ekonomi yang positif terhadap kehidupan ekonomi warga NU.⁶

Di era Orde Baru, kekuatan politik NU dibonsai dan dikebiri sedemikian

⁵ Dua UU ini mengatur pengawasan ketat dan izin mengajar bagi guru di sekolah-sekolah partikelir swasta di luar sekolah yang didirikan oleh Belanda.

⁶ Sarbumusi pada awalnya didirikan dalam rangka kepentingan Pemilu 1955 untuk memobilisasi dan "memagari" massa buruh Nahdliyin dari ekspansi SOBSI (*ouderbouuw* PKI) yang menjadi serikat buruh terbesar saat itu dan banyak menarik minat kaum buruh. Namun, kemudian Sarbumusi –ketika SOBSI bubar pasca G.30.S 1965- menjadi "terompet ekonomi" bagi NU untuk menyuarakan aspirasi NU yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, khususnya perburuhan. Sarbumusi di awal Orde Baru secara tegas menolak isu intervensi asing dalam aktivitas ekonomi Indonesia, khususnya dalam urusan perburuhan. Sarbumusi juga menolak larangan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota serikat buruh. Di awal Orde Baru, Sarbumusi merupakan serikat buruh terbesar dengan keanggotaan hamper di semua sektor industri termasuk sektor pegawai negeri sipil. Politisi NU yang juga seorang ekonom, Subchan ZE secara rutin menuangkan pemikiran ekonominya di buletin "Berkala Sarbumusi", (Alfanny, Sarbumusi, 1955-1973, Skripsi Sarjana FSUI, 2001).

rupa oleh Orde Baru sehingga akhirnya pada Muktamar NU 1984 di Situbondo, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926. Konteksnya, NU ingin melepaskan diri dari “penjara politik” PPP yang didesain oleh Orde Baru. Dengan keluarnya NU dari PPP, NU memasuki ranah “civil society” yang merupakan habitat asli NU.

NU di bawah kepemimpinan Gus Dur lebih leluasa membangun kemandirian politiknya tanpa harus menjadi alat legitimator kebijakan otoritarian Orde Baru sebagaimana yang dilakukan NU selama masih di dalam PPP. Walaupun tidak lagi “menyusu” kepada Orde Baru, NU masih bisa mengembangkan gerakan ekonominya dengan menjalin kemitraan dengan Bank Summa. NU mendirikan BPR Nusumma untuk menggerakkan sektor ekonomi riil dengan memberikan kredit mikro bagi pelaku ekonomi kecil yang mayoritas warga NU. Pendirian BPR Nusumma ini merupakan “quantum leap” bagi NU mengingat mayoritas umat Islam masih memperdebatkan tentang halal-haramnya bunga bank. Sayangnya, seiring dengan dilikuidasinya Bank Summa, BPR Nusumma pun tidak berkembang.

Namun kiprah NU di ranah “civil society” serta pembaruan yang dilakukan Gus Dur telah membawa NU melampaui karakter tradisionalnya. NU makin dikenal dan diperhitungkan dalam wacana politik nasional terutama wacana oposisi alternatif yang melawan rejimntasi Orde Baru yang di akhir kekuasaannya mulai menggunakan simbol-simbol

agama seperti ICMI dan lain-lain. Orde Baru melalui ICMI juga meniru langkah ekonomi yang dilakukan NU dengan mendirikan Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang hanya menjadi monumen bank syariah pada saat itu, tapi tidak bertujuan seperti BPR Nusumma yang berniat menggerakkan sektor ekonomi riil di pedesaan.

Pasca Orde Baru tumbang, NU pun kembali tergoda masuk ke ranah politik praktis dengan mendirikan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Hampir semua sumber daya dan simbol NU dikerahkan untuk memenangkan PKB pada Pemilu 1999 di mana PKB berhasil meraih suara 12%, masih di bawah perolehan suara NU pada Pemilu 1955 dan 1971 yang mencapai 18%.

Walaupun PKB berhasil meraih suara yang lumayan dan Gus Dur menjadi presiden, namun kebijakan ekonomi pemerintah masih terfokus pada sektor moneter dan belum menyentuh kehidupan ekonomi rakyat kecil yang *notabene* warga NU. Pasca Gus Dur lengser digantikan Megawati dan kemudian SBY, arah kebijakan ekonomi Indonesia belum memberikan perhatian yang layak bagi upaya pengembangan usaha kecil dan mikro serta pengurangan jumlah angka pengangguran.

Di era SBY, sejak 2004 hingga kini, kehidupan ekonomi rakyat kecil benar-benar terpukul dengan sempat naiknya harga BBM hingga tiga kali dan dampak krisis keuangan AS di akhir 2008. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat) yang digulirkan pemerintahan SBY bagaikan program sinterklas yang belum mampu merubah struktur ekonomi nasional yang timpang dengan sejumlah indikator yaitu minusnya pertumbuhan pasar tradisional dan meledaknya angka pengangguran.⁷ Padahal pedagang pasar tradisional mayoritas adalah warga NU yang –karena ijazahnya “cuma” pendidikan agama- memilih menjadi wirausaha menjadi pedagang kulakan kecil di pasar tradisional.

Satu indikator lagi adalah meroketnya angka kemiskinan dan meningkatnya “ekspor” TKI.⁸ Walhasil, masuknya NU –melalui PKB- ke dalam sistem politik pasca Orde Baru yang relatif bebas dan demokratis tidak mampu secara

struktural merubah kondisi ekonomi warga NU yang *notabene* mayoritas adalah kelas miskin di pedesaan.

Karakter Ekonomi Warga NU

Sebelum kita membahas solusi bagaimana NU mampu berdaya mengentaskan warganya dari jeratan kemiskinan, maka kita perlu membedah karakter ekonomi warga NU.

Pertama, mayoritas warga NU tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian petani dan nelayan. Sebagian dari mereka bahkan hanya sebagai petani penggarap (*peasant*) yang tidak memiliki tanah. Kaum nelayan Indonesia juga merupakan kaum nelayan bermodal lemah dengan teknologi rendah sehingga

⁷ Angka pengangguran di Indonesia kini mencapai 9,39 juta. Bahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5% (www.koranindonesia.com, 28 Agustus 2008). Jumlah pasar tradisional di Indonesia lebih dari 13.450 pasar dengan jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang, yang sangat signifikan dan sangat strategis dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan Survey AC Nielsen pertumbuhan Pasar Modern (termasuk Hypermarket) sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan Pasar Tradisional 8,1% (SWA, Edisi Desember 2004). Dari sumber APPSI sendiri di Jakarta ditemukan bahwa setiap tahun terdapat 400 kios di pasar yang tutup. Kondisi ini terjadi juga di kota-kota besar lainnya. Serbuan hypermarket dengan dukungan kekuatan raksasa di bidang permodalan, sistem dan teknologi serta penerapan praktik bisnis yang tidak sehat berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional. Hampir semua pasar tradisional mengalami penurunan omzet sampai 75%, bahkan ada pedagang yang dalam satu harinya untuk mendapatkan Rp. 50.000,- sudah susah. Di DKI Jakarta, pada tahun 2004 saja, ada 7 pasar sudah dilikuidasi (Blora, Cilincing, Cipinang Besar, Kramat Jaya, Muncang, Prumpung Tengah dan Sinar Utara). Di Kabupaten Tangerang 5.908 kios dan los tutup dari 9.392 kios dan los yang ada (Sumber PD. Psr Niaga Kerta Raharja) (diolah dari www.appsijatim.multiply.com)

⁸ *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) memproyeksikan jumlah penduduk miskin pada 2009 mencapai 40 juta orang (16,82%). Jumlah ini meningkat sekitar 5 juta dibandingkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008, yang mencatat penduduk miskin sebanyak 34,96 juta orang (15,42%) (sumber: www.targetmdgs.org). Sementara itu, sekitar 3 juta warga Indonesia harus menjadi TKI di luar negeri (www.detik.com/ Senin, 20/03/2006 16:25 WIB). Propinsi pengirim TKI terbesar adalah Jawa Timur dan NTB yang warganya mayoritas warga NU.

tangkapan ikan mereka masih jauh dari tangkapan ikan nelayan-nelayan asing berteknologi tinggi yang sering mencuri ikan di wilayah Indonesia.⁹

Kedua, pola produksi ekonomi warga NU –yang *notebene* pertanian- masih berpola subsistensi alias berorientasi memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan belum berorientasi pasar. Bila petani-petani Nahdliyin mampu mengembangkan produk padi organik misalnya, maka nilai tambahnya pasti akan lebih besar dibandingkan produk padi non-organik.¹⁰

Ketiga, walaupun di beberapa kota basis NU seperti Pekalongan sudah tumbuh kelas menengah pengusaha yang cukup kuat, tapi mereka masih berkuat pada sektor informal seperti pengrajin dan pedagang batik. Jarang ditemui pengusaha berlatar belakang Nahdliyin

yang berkiprah di sektor formal yang padat modal seperti industri IT, telekomunikasi, otomotif dan elektronik.

Keempat, sebagian besar warga NU adalah lulusan pesantren dan IAIN/STAIN yang relatif tidak punya kemampuan untuk “link and match” dengan kebutuhan teknoratis sektor industri modern. Bahkan tingginya kebutuhan tenaga ahli keuangan syariah akibat “meledaknya” sektor industri perbankan syariah belum secara maksimal dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan NU.

Warga NU yang sebagian besar hanya menamatkan pendidikannya di tingkat SMP-SMA harus puas menjadi buruh pabrik yang pendapatannya diatur dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). Sementara, sebagian warga NU yang mengenyam pendidikan tinggi –tapi menganggur karena tidak “link and

⁹ Berdasarkan perbandingan hasil empat kali Sensus Pertanian (SP) diketahui bahwa rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indonesia terus menurun, dari 1,05 hektar (1963) menjadi 0,99 hektar (1973), lalu turun menjadi 0,90 hektar (1983) dan menjadi 0,81 hektar (1993). Hasil SP 1993 menunjukkan bahwa 21,2 juta rumah tangga di pedesaan, 70%-nya menggantungkan diri pada sektor pertanian. Dari jumlah itu, 3,8% atau sekitar 0,8 juta merupakan rumah tangga penyakap yang tidak punya tanah, 9,1 juta rumah tangga menjadi buruh tani, dan diperkirakan jumlah petani tak bertanah di Indonesia ada sekitar 9,9 juta atau sekitar 32,6% dari seluruh rumah tangga petani (lihat Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, Lembaga Penerbit FE 1997) (sebagaimana dikutip oleh www.kpa.or.id). Jumlah tangkapan ikan tuna nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan di perairan Samudera Hindia bagian timur (SHBT) seperti PT Perikanan Samodra Besar (PT PSB), sejak tahun 1973 hingga sekarang cenderung menurun (Batubara, 2003). Jumlah tangkapan perseratus mata pancing (*hook rate*) rata-rata dan tahun 1997 hingga 1999 menurun dengan nilai berturut-turut sebesar 0,84, 0,78 dan 0,57 (Gaol, dkk., 2001). Ironisnya, kapal-kapal asing penangkap ikan tuna semakin meningkat jumlahnya di Sarnudra Hindia. Sebagai contoh jumlah kapal tuna nelayan China yang menangkap tuna di Samudra Hindia pada tahun 1995 hanya 12 buah, tetapi pada tahun 1999 meningkat menjadi 148 buah. Demikian juga total hasil tangkapannya pada tahun 1995 sebesar 403 ton menjadi 2.816,5 ton pada tahun 1999 (WPDCS, 1999). Lihat www.asosiasi-politeknik.or.id).

¹⁰ Emily Sutanto, pendiri sekaligus Direktur Utama PT Bloom Agro, di Tasikmalaya, Jawa Barat menceritakan pengalamannya menjejahterakan petani dengan padi/beras organik. Emily tak harus

match" dengan kebutuhan industri modern- terpaksa berjejal menjadi pengurus partai politik, ormas, dan LSM.

Mengapa Sayap Ekonomi Warga NU Lemah?

Dibandingkan dengan sayap politik dan sayap pemikiran, sayap ekonomi NU secara objektif paling tidak bisa dibanggakan. Jarang kita dengar NU –secara organisasi- mendirikan sebuah badan usaha yang kemudian bisa menopang kebutuhan operasional NU sehingga NU mandiri secara ekonomi yang pada gilirannya independen secara politik. Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi warga NU lemah.

Pertama, adanya upaya sistematis pemerintah kolonial untuk melemahkan ekonomi –tidak hanya kaum santri/NU- tapi juga bangsa Indonesia antara lain dengan menciptakan desain "negara pegawai" (*beambtenstaat*) yang secara perlahan namun pasti mematikan semangat *entrepreneurship* rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang bermukim di tepi pantai dan berkarakter bahari.

Ironisnya, desain "negara pegawai" ini diteruskan oleh Orde Baru dengan

tujuan yang sama dengan Kolonial Belanda, yaitu memastikan loyalitas kelas menengah berpendidikan kepada rejim yang berkuasa. Berbagai universitas dan akademi yang didirikan pemerintah maupun swasta sejak era Kolonial hingga kini masih mentransfer *mindset* pegawai kepada mahasiswanya.

Kedua, kegagalan program ekonomi pada demokrasi liberal yang bertujuan mencetak kelas pengusaha nasional (baca: pribumi) yang mampu bersaing dan mendobrak dominasi pengusaha asing (baca: keturunan China) saat itu. Sejak itu, belum ada upaya sistematis dari pemerintah untuk melakukan *affirmative action* terhadap kelas pengusaha pribumi.

Ketiga, yaitu *political oriented* dan latar pendidikan agama yang dominan pada warga NU sebagaimana sudah diulas belakangan.

Banyak cerita miris beredar ketika sekelompok massa dari warga NU Jawa Timur yang harus menjual ternaknya untuk membiayai keberangkatannya ke Jakarta, (hanya) untuk bisa ikut serta demonstrasi mendukung Gus Dur di tahun 1999-2001. Sementara itu, latar

membeli beras dari petani, tetapi cukup melalui Gapoktan Simpatik agar petani mendapat nilai tambah. Gabah organik setelah diproses di penggilingan milik petani menjadi beras dibeli Emily dengan harga Rp 8.000 per kilogram. Dengan harga beli yang tinggi, Gapoktan membeli gabah kering pungut dari petani anggotanya dengan harga Rp 3.500 per kilogram atau lebih tinggi Rp 1.500 dibandingkan gabah nonorganik. Ditambah lagi, model penanaman padi dengan sistem intensif membuat ada petani yang mampu meningkatkan produktivitas padinya hingga menghasilkan 10 ton gabah kering panen. Dengan produktivitas setinggi itu, pendapatan kotor petani dalam satu musim tanam (empat bulan) bisa sekitar Rp 35 juta. Apabila dalam setahun padi bisa ditanam tiga kali, pendapatan kotor petani dengan lahan 1 hektar dapat menembus Rp 105 juta. Lihat www.kompas.com/12 September 2009).

belakang pendidikan agama yang tidak “*link and match*” dengan kebutuhan sektor industri modern menjadi penyebab banyaknya warga NU menjadi pengangguran dan terpaksa hidup dari *event-event* politik seperti Kongres Ansor, Mukhtar NU, Pilkada, Pileg dan Pilpres. Tentu ini sebagian kecil saja. Tapi kalau tidak diperhatikan bisa berkembang seperti virus.

Keterpurukan NU dalam sektor ekonomi makin diperparah oleh hancurnya “outlet” politik NU yaitu PKB –dan juga PKNU- yang hanya memperoleh total 4,9% dan 1,7% suara sehingga banyak caleg NU yang gagal jadi anggota legislatif dan menambah barisan pengangguran warga NU. Sementara tantangan atmosfer ekonomi neoliberalisme menghadang dan mengancam sendi-sendi ekonomi warga NU.

Neoliberalisme dan Liberalisme dalam Ekonomi

Istilah liberal sebenarnya mencakup banyak aspek mulai dari politik, agama dan yang mungkin paling banyak perdebatan di antara semuanya adalah liberalisasi ekonomi. Saat Pemilu Presiden lalu, istilah neoliberalisme atau neoliberal terasa sangat familiar di telinga. Saat itu pula wacana mengenai neoliberalisme mengemuka dan isme yang satu itu se-

lalu disudutkan menjadi sesuatu yang jahat, tidak berpihak kepada yang lemah dan tidak sesuai dengan agama. Apa yang menjadikan neoliberalisme diberikan cap sebagai sesuatu yang jahat? Hal ini akan terjawab bila kita melihat bagaimana sejarah, pemikiran dan perkembangan neoliberalisme.

Neoliberalisme berkembang di tahun 1970-an, saat perekonomian Amerika saat itu stagnan, terjadi kombinasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, di mana pemikiran Keynes selama masa perang dunia dan sesudah perang dunia menjadi satu-satunya referensi pembuat kebijakan.¹¹ Saat itu Hayek dan Milton Friedman mendobrak dengan mengatakan bahwa harus ada liberalisasi ekonomi untuk mendorong kembali perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.¹² Karena itulah, pemikiran Friedman saat itu dikenal dengan nama neoliberalisme dan teori ekonominya dikenal dengan neo-klasik, karena keduanya merupakan pemikiran yang telah lama ada tapi dengan konteks baru yang sedikit berbeda.

Liberalisme ekonomi dalam pandangan klasik Smith memberikan landasan dasar pada neoliberalisme. Jika mencermati lebih jauh pandangan Smith kita dapat membedakannya ke dalam dua tulisannya yang sampai saat ini masih diba-

¹¹ Sejak pemikiran Keynes menjadi salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi dunia di tahun 1930-an atau yang dikenal dengan *malaise*, pemikiran Keynes mendominasi kebijakan pemerintahan sampai diperkenalkan neoliberalisme oleh Hayek dan Friedman. Untuk pengetahuan lebih jauh ada baiknya membaca pemikiran Keynes.

¹² Liberalisasi ekonomi sendiri diperkenalkan oleh tokoh ekonomi klasik Adam Smith di mana pemikirannya mengenai *invisible hands* dan peran minimal pemerintah dalam pilihan dan keputusan

ca yaitu *The Theory of Moral Sentiment* (1759) dan *The Wealth of Nation* (1776). Pada *The Theory of Moral Sentiment* fokus dari tulisan Smith adalah bagaimana manusia membedakan yang benar dan yang salah, lantas bagaimana ia menghadapi keduanya. Dalam *The Wealth of Nation* barulah ia mengemukakan mengenai keseimbangan pasar yang didorong oleh maksimisasi utilitas setiap orang (pembeli dan penjual) sehingga muncul *invisible hands* yang selalu mendorong pasar dalam keadaan seimbang.

Untuk memaksimalkan utilitasnya, maka sebagai manusia ekonomi (*economic man*), mereka membutuhkan kebebasan untuk mendorong motif ekonomi dalam diri mereka. Kebebasan ekonomi menurutnya pada akhirnya akan menciptakan perubahan ekonomi yang didasarkan pada akumulasi kapital dan meningkatnya keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan.¹³

Dari liberalisasi ekonomi ala Smith kemudian liberalisasi perdagangan juga diungkapkan oleh David Ricardo. Ia memberikan landasan bahwa perdagangan memberikan *mutual gain* bagi kedua pihak sehingga praktik proteksionisme harus dikurangi. Dari sinilah perdagangan bebas diperkenalkan dan kemudian istilah globalisasi mengemuka. Karena itulah kemudian perdagangan bebas dan globalisasi kemudian menjadi bagian dari

neoliberalisme dan kemudian menjadi wacana yang diulas begitu banyak orang baik yang pro dan kontra terhadapnya. Lalu mengapa liberalisasi ekonomi menjadi sebuah momok yang menakutkan saat Smith mendasarkannya pada moralitas dan perdagangan bebas didasarkan pada keuntungan kedua pihak?

Setidaknya ada lima hal yang menjadi kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan neoliberalisme yaitu: pasar bebas, pemotongan pembiayaan publik untuk pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dll), deregulasi, privatisasi, dan lain-lain.

Kelimitya dituduh sebagai biang keladi dari ketimpangan yang semakin besar dan kemiskinan. Dalam *Flat World Big Gaps* ketimpangan global dan ketidakseimbangan distribusi dari keuntungan dan kerugian pertumbuhan ekonomi global dibahas oleh beberapa penulis dengan kesimpulan bahwa terdapat bukti yang menunjukkan ketika distribusi pendapatan pada level dunia tidak meningkat, ketimpangan distribusi semakin memburuk di banyak negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia Timur (Jepang, Korea, China) dan India tidak mengurangi secara signifikan kemiskinan di banyak bagian dunia. Hal yang sama juga ditemukan oleh Martin.¹⁴ Menurutnya, jika Afrika tidak mulai tumbuh perekonomiannya

ekonomi di dalam pasar lebih disukai daripada campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian.

¹³ Grampp, William Dyer *Economic Liberalism* (New York: Random House, 1965). vol. 2 The Classical View.



privatisasi hanya berkumpul pada kelompok kecil dan menuduh masyarakat miskin malas jika gagal memenuhi sendiri kebutuhan mereka akan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Adapun para neoliberalis meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencapai efisiensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya bermuara pada sebuah kesejahteraan. Setidaknya bagi me-

dalam waktu dekat, maka kesenjangan antara Afrika dan negara-negara maju dan negara yang berpendapatan menengah akan semakin jauh dan akibatnya ketimpangan pendapatan global akan semakin meningkat.

Kemudian apa sebenarnya cacat dari kelima hal tersebut, karena secara rasional manusia selalu berpikir ke arah perbaikan. Martinez dan Garcia mengungkapkan bahwa kelima hal tersebut akan merugikan masyarakat dengan memperhitungkan kerusakan sosial yang disebabkan pasar bebas, penurunan upah buruh, mengurangi jaring pengaman sosial untuk masyarakat, lingkungan hidup yang terancam karena regulasi pemerintah yang minim, meningkatkan ketimpangan akibat hasil keuntungan dari

reka keajaiban dari neoliberalisme terjadi pada Polandia, Chile, China dan India. Jika Adam Smith dan pengikut klasik dan neoklasiknya beranggapan, manusia selalu berpikir rasional dan dibatasi moral. Lalu Keynes berpendapat, pemerintah dapat berperan dengan baik mengatur pemerintahan dan perekonomian dengan bersih, maka selalu ada kritik yang ditujukan pada keduanya.

Praktek Neoliberalisme di Indonesia: Beberapa Contoh

Wacana neoliberalisme yang menghangat pada saat Pilpres kemarin menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat, apa saja contoh praktek neoliberalisme di Indonesia?

Pertama, Undang-Undang Nomor

¹⁴ Xavier Sala-i-Martin, *The Disturbing "Rise" of Global Income Inequality* NBER Working Paper No. 8904 April 2002

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Undang-Undang yang keluar semasa pemerintahan SBY-JK ini memberikan fasilitas, insentif dan kemudahan yang sangat luas kepada penanam modal. Penguasaan tanah diperbolehkan hingga jangka waktu 95 tahun melebihi ketentuan UU Agraria tahun 1870 masa Hindia-Belanda yang hanya mengizinkan selama jangka waktu 75 tahun (hak erfacht).¹⁵

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Padahal UU PMA telah menjadi sebab tergerusnya kekayaan alam tambang, perkebunan dan hasil hutan selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Selain itu UU PMA yang kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 telah menyerahkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk dikuasai secara mayoritas oleh modal asing.¹⁶

Ketiga, privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Privatisasi Indosat

adalah privatisasi BUMN yang paling heboh di era pasca Orde Baru.¹⁷

Keempat, pasar Indonesia yang sangat terbuka untuk produk retail luar negeri. Sebagai contoh sebagaimana sudah diulas sebelumnya bahwa pertumbuhan pasar ritel modern sangat pesat mengakibatkan minusnya pertumbuhan pasar tradisional. Di sisi lain, China dan India yang karakter ekonominya mirip Indonesia justru membatasi masuknya ritel asing seperti Carrefour.¹⁸

Respon NU terhadap Neoliberalisme

Sulit membayangkan yang harus dilakukan NU menghadapi tantangan neoliberalisme sebagaimana sulitnya membayangkan sebuah lilin dapat mengusir kegelapan di sebuah ladang yang luas. Namun, seperti kata pepatah "lebih baik menyalakan lilin, daripada mengutuk kegelapan", maka potensi ekonomi warga NU yang ada harus dioptimalisasi demi percepatan kesejahteraan rakyat.

Berikut beberapa hal yang mungkin

¹⁵ www.globaljust.org, Kamis, 23 Juli 2009, Pernyataan Institute for Global Justice (IGJ)

¹⁶ www.globaljust.org, Kamis, 23 Juli 2009, Pernyataan Institute for Global Justice (IGJ)

¹⁷ Namun, privatisasi BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak Orde Baru. Pemerintah menjual 35 % saham PT Semen Gresik (1991), 35 % saham PT Indosat (1994), 35 % saham PT Tambang Timah (1995), 23 % saham PT Telkom (1995), 25 % saham BNI (1996), 35 % saham PT Aneka Tambang (1997). Selain Indosat, pemerintah era pasca Orde Baru kembali menjual 14 % saham PT Semen Gresik, 51 % saham PT Pelindo II dan 49 % saham PT Pelindo III. Tahun 2001 pemerintah lagi-lagi menjual 9,2 % saham Kimia Farma, 19,8 % saham Indofarma, 30 % saham Sucofindo dan 11,9 % saham PT Telkom (www.bumn-ri.com, sebagaimana dikutip oleh Agil Suratno, "Privatisasi BUMN dan Sukses Pemilu 2009", Banjarmasin Post, 17 Maret 2009.

¹⁸ Pengamat bisnis ritel Hidayat berpendapat ada fenomena yang menarik dalam perkembangan ritel antara negara yang liberal dalam arti membebaskan ritel asing masuk seperti Indonesia dengan negara-negara yang memproteksi pasar ritelnya bahkan menutup rapat-rapat untuk ritel asing seperti India. Ia berpendapat bahwa umumnya negara yang liberal dengan ritel asing justru mengalami pertumbuhan ritel yang lebih rendah dari negara yang menutup diri ataupun membatasi

bisa dilakukan NU dan warga NU.

Pertama, NU harus memperkuat sayap politiknya agar bisa secara signifikan mempengaruhi kebijakan pemerintah (syukur-syukur bisa merebut kendali pemerintahan seperti era Gus Dur) agar menghasilkan produk-produk politik-ekonomi yang tidak bernafaskan neo-liberalisme. Karena pelbagai kebijakan ekonomi yang bernafaskan neoliberalisme jelas dihasilkan oleh presiden-wakil presiden dan wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu.

Kedua, NU harus mulai melakukan langkah-langkah modernisasi organisasi untuk membiayai operasional organisasi seperti pengelolaan iuran/zakat/infaq/sedekah di kalangan NU yang lebih profesional. Dengan demikian, sebagian hasilnya bisa digunakan selain untuk menyantuni para mustahik juga bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi warga NU melalui BMT, koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah yang pada gilirannya sebagian labanya bisa digunakan untuk membiayai operasional organisasi. Optimalisasi aset-aset yang dimiliki NU seperti sekolah dan

pesantren yang dikelola LP Ma'arif bila dikelola secara baik tidak mustahil bisa mendatangkan laba bagi pembiayaan organisasi NU.

Ketiga, NU harus memobilisasi dan mengoptimalisasi asetnya untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Sebagai contoh, pesantren-pesantren bisa saja menyewakan sebagian tanahnya bagi unit usaha komersial seperti Pusdiklat, pembangunan menara BTS selain usaha pertanian dan peternakan yang sudah lama dilakukan.

NU –secara organisasi- dapat membantu pemasaran dan pelatihan manajemen dengan imbal balik pesantren tersebut menyisihkan sebagian labanya untuk operasional NU dengan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Keempat, NU harus memberikan perhatian yang lebih terhadap generasi mudanya baik di pesantren, madrasah ataupun sekolah/universitas umum. NU harus memfasilitasi generasi mudanya agar menjadi generasi unggulan yang kreatif, cerdas, berdaya saing, punya kepedulian sosial dan berakhlakul karimah dalam pengertian yang luas.

ruang gerak ritel asing. Misalnya negara seperti India yang melarang ritel asing masuk, justru prospek pertumbuhan ritel selalu berada di atas produk domestik bruto (PDB) termasuk China yang selalu tumbuh 10%. "China hanya membolehkan ritel asing masuk di 12 kota di pantai, karena mereka menganut dua sistem ekonomi yaitu liberal di wilayah perkotaan, sosialis di pedesaan atau wilayah pedalaman,". Sedangkan negara-negara yang bebas memperbolehkan ritel asing masuk seperti Filipina, Indonesia dan Thailand, pertumbuhan ritelnya mengikuti pertumbuhan ekonomi yang justru selalu berada di bawah 10% . Misalnya Indonesia pada tahun 2008 pertumbuhan ekonominya 6% lebih, maka ritelnya pun tumbuh di sekitar itu, bahkan tahun ini hanya diperkirakan 4% saja (www.kilasberita.com, "Pemerintah Harus Belajar ke India, Ritel Asing Incar Indonesia, Jumat, 13 Februari 2009)

Melalui reorganisasi Banom pelajar dan pemudanya (IPNU-IPPNU, Ansor-Fatayat) NU dapat menggembelng generasi mudanya sebagai "new generation of NU" yang tetap memegang teguh Aswaja, tapi berdaya saing tinggi untuk maju mengikuti *fit and proper test* direktur utama Pertamina –bukan hanya bercita-cita jadi Menteri Agama.

Penutup

Di akhir tulisan ini, kami teringat guru ngaji kami di wilayah Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat, seorang tua yang pernah menjadi aktifis Ansor di Cirebon tahun 1965-1966 dan konsis-

ten menyekolahkan tiga anak lelakinya di Pesantren Buntet Cirebon. Matanya berkaca-kaca terharu ketika menjelang Idul Fitri 1430 H, kami menyerahkan satu paket zakat titipan Jusuf Kalla yang berlogo NU. Mungkin sudah lama dia tak melihat logo NU di Jakarta (walau-pun Ketua PWNU DKI Jakarta adalah juga Gubernur DKI Jakarta).

Mungkin juga dia merasa gagal, karena ketiga anaknya yang alumni Buntet "tidak mampu" berpisah dengan dirinya dan ia terpaksa "berbagi rumah" dengan ketiga anak beserta menantunya. Sebuah gambaran involusi ala Clifford Gertz yang terang-benderang.[]